**MODEL JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEBAGAI HAK
TENAGA KERJA INDUSTRI BATU ALAM DI KECAMATAN
DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

Ahmad Dahlan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Al-Ishlah Cirebon, Indonesia

Email: ahmddahlan2015@gmail.com

Abstrak

Kajian ini dilakukan untuk menganalisa model jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagai hak atas industri batu alam di Dukupuntang Cirebon berdasarkan perspektif maqashid Syariah (an-Nafs). Kecamatan Dukupuntang merupakan pusat industri batu alam di Cirebon. Dengan kehadiran, pengembangan dan kemajuan pekerja ini tidak dapat dipisahkan dari kecelakaan seperti pisau dipotong, cruse batu dan gas oksigen ledakan silinder. Majikan bertanggung jawab tetapi tidak sepenuhnya karena keterbatasan biaya asuransi ketidaktahuan asuransi tenaga kerja/jaminan sosial tenaga kerja. Islam mendorong Muslim untuk menjaga kelima maqashid Syariah salah satunya adalah menjaga jiwa (an-Nafs) yang terkait dengan model jaminan sosial tenaga kerja. Metode yang digunakan itu deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan sebanyak 23 responden. Berdasarkan hasil analisis, pengusaha industri batu alam menggunakan jaminan Ketenagakerjaan tradisional yang menggunakan semua biaya pengobatan ketika kecelakaan kepada pekerja. Model jaminan sosial Ketenagakerjaan yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi pekerja yang membutuhkan dharuriyat. Hal ini perlu ada karena ketika kebutuhan yang timbul tidak terpenuhi wiil terancam keselamatan-Nya dan berada dalam perspektif maqashid Syariah (an-Nafs) berbasis comformety.

Keywords: Ketenagakerjaan jaminan sosial, hak buruh, maqashid Syariah

Abstract

This study was conducted to analyze manpower social security model as a right of the natural stone industry in Dukupuntang Cirebon

based on perspective maqashid syariah (an-nafs). District of Dukupuntang is the center of natural stone industry in Cirebon. With presence, development and advancement of this workers can not be separated from the accident like a knife cut, cruse stone and oxygen gas cylinder explosion. Employers are responsible but not completely due to limitations on insurance costs ignorance the labor insurance/manpower social security. Islam encourages muslims to keep fifth maqashid syariah one of which is keeping the soul (an-nafs) associated with manpower social security model. The method used it descriptive and qualitative approach. Source of data used consist of primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews with as many as 23 respondents. Based on the result of the analysis the natural stone industry employers using the traditional employment guarantee that is using all the medical expenses when an accident to workers. Manpower social security model that is the most basic need for workers that need dharuriyat. This need to be there because when the needs arises are not met wil be threatened his safety and is in comformety based maqashid syariah perspective (an-nafs).

Keywords: manpower social security, labor right, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Manulang, 2002: 3). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa peran tenaga kerja itu sangat penting bagi pembangunan di negeri ini, akan tetapi sering kali ada beberapa tenaga kerja yang masih saja diabaikan hak-haknya.

Adapun hak-hak tenaga kerja yang harus pemerintah lindungi salah satunya yang tercantum dalam Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2013 pasal 89 ayat 1 tentang ketenagakerjaan serta hak keselamatan dan kesehatan kerja, di dalam pasal tersebut yang wajib dilaksanakan atau dipatuhi oleh sebuah perusahaan/industri. Menurut Undang-undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekrutan industri.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, selain itu industri juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Hal ini membuktikan betapa besarnya pengaruh industri dalam suatu negara, tanpa terkecuali diantaranya Industri Batu

Alam yang berada di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Industri batu alam adalah industri yang mengolah bahan baku mentah bongkahan batu sampai dengan menghasilkan bentuk, ukuran lain sebagainya contohnya (1) rata mesin (RTM), (2) rata alam (RTA), (3) bakar (*flame*), (4) motif alur (aluran), (5) susun sirih, (6) *wall cladding* (WCL), (7) *coble stone*, (8) poles halus (*honed*) dan (9) poles kilap (*polished*). Berikut ini daftar sentra batu alam yang berada di Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.1 Daftar Sentra Industri Batu Alam Kabupaten Cirebon 2012

Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Dukupuntang	237	1.014
Depok	63	569
Gempol	9	39
Palimanan	35	388
Jumlah	344	2.010

Sumber: Puspasari: 2014 (Skripsi)

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa dari keempat sentra industri batu alam di Kabupaten Cirebon. Kecamatan Dukupuntang merupakan salah satu wilayah yang memiliki unit usaha dan tenaga kerja paling banyak diantara empat wilayah sentra industri batu alam di Kabupaten Cirebon yaitu sebanyak 237 unit usaha dan 1.014 tenaga kerja. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kecamatan Dukupuntang merupakan pusat sentra industri batu alam di Kabupaten Cirebon (Puspasari: 2014).

Dengan keberadaan dan berkembangnya industri ini telah membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut, dampak positifnya adalah (1) membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, (2) menambah pendapatan asli daerah tersebut, (3) meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat, sedangkan dampak negatifnya adalah (1) polusi, (2) pencemaran limbah air dan (3) kebisingan (Fathiah: 2011). Seiring majunya industri ini maka peningkatan intensitas operasional kerja banyak berhubungan dengan mesin-mesin dan alat-alat yang merupakan sumber bahaya bagi pekerja.

Pekerja di industri ini tidak terlepas dari kecelakaan seperti tergencet batu, teriris pisau dan terbakar akibat meledaknya tabung oksigen karena disebabkan kurangnya pengetahuan, keterampilan, sikap dan keletihan. Kecelakaan yang terjadi secara umum tidak menyebabkan terganggunya hari kerja di lingkungan industri tersebut. Ketika pekerja mengalami kecelakaan tersebut, perusahaan bertanggungjawab tetapi tidak sepenuhnya. Karena keterbatasan biaya dan ketidatahuan/minimnya pengetahuan pengusaha industri batu alam tentang asuransi tenaga kerja/jaminan sosial ketenagakerjaan (Tarigan: 2008).

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan pasal 117 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja

berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000 sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Wahab, 2001: 145).

Dalam kenyataannya masih banyak pengusaha industri ini hanya mementingkan keuntungan yang ingin dicapai melainkan tidak memperhatikan hal-hal seperti keselamatan dan kesehatan pekerjaanya. Hal ini dapat menyebabkan pekerja cacat, sakit, bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi hal tersebut maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yaitu tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengatur pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian.

Sejatinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang menanggulangi berbagai resiko sekaligus akan memberikan ketenangan kerja yang pada saatnya akan membantu meningkatkan produktivitasnya. Ketenangan kerja dapat tercipta karena adanya jaminan sosial ketenagakerjaan mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi berbagai resiko sosial ekonomi tersebut. Agar kepesertaan dan pemanfaatannya dapat dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib.

Pembiayaan jaminan sosial ini ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja itu sendiri sesuai dengan jumlah yang tidak memberatkan bagi keuangan kedua belah pihak. Pembiayaan jaminan kecelakaan kerja ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha, karena kecelakaan dan penyakit yang timbul dalam hubungan kerja merupakan tanggungjawab penuh dari pemberi kerja.

Pembiayaan jaminan kematian dan jaminan kesehatan juga menjadi tanggungjawab pengusaha yang harus bertanggungjawab atas kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sementara itu pembiayaan jaminan hari tua ditanggung bersama pengusaha kepada tenaga kerjanya yang bertahun-tahun bekerja di perusahaan dan sekaligus merupakan tanggungjawab tenaga kerja untuk hari tuanya sendiri. Kemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan pada hakekatnya bersifat dasar untuk menjaga harkat dan martabat tenaga kerja. Dengan kemanfaatan dasar tersebut, pembiayaannya dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga dapat dijangkau oleh setiap pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dan tenaga kerja yang memiliki keuangan yang lebih besar dapat meningkatkan kemanfaatan dasar tersebut melalui berbagai cara lainnya.

Agar kepesertaannya wajib dari jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dipatuhi oleh seluruh pengusaha dan tenaga kerja, maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah ini memberikan sanksi yang tujuannya untuk mendidik yang bersangkutan dalam memenuhi kewajibannya. Sanksi tersebut merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di samping dapat membantu meringankan biaya perusahaan, khususnya jika ada kecelakaan yang memerlukan biaya yang sangat besar, juga mengurangi beban pemikiran perusahaan dalam menangani masalah kesehatan dan kecelakaan kerja, sehingga perusahaan bisa lebih berkonsentrasi terhadap usahanya (Suwanto: 2006).

Agama Islam sangat menganjurkan umat Islam di dunia maupun di akhirat untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Kelima maqashid

syariah tersebut sangat erat kaitannya dengan tenaga kerja dan pengusaha karena keduanya merupakan bagian dari anggota masyarakat yang tindakannya dalam berkarya menggunakan dan menjadikan 5 (lima) hal sebagai landasan hidup. Untuk menjamin keselamatan kerja dalam berkarya di sektor industri, menjaga keselamatan jiwa manusia dan lingkungan kerja merupakan usaha melestarikan kehidupan.

Demikian pula dalam jaminan sosial tenaga kerja dalam Islam memerintahkan kepada pengusaha untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada pekerjanya. Sebab pekerja itu merupakan bagian dari perusahaan dan jika bukan karena pekerjanya tidak mungkin pengusaha dapat berhasil dengan baik. Antara pengusaha dan pekerja memiliki andil yang sangat besar untuk kesuksesan usahanya, maka pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-haknya termasuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini tercantum dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuat model jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai hak tenaga industri batu di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon berdasarkan perspektif maqashid syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi deskriptif analitik yang

dipakai dalam penelitian ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2012) adalah metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode kualitatif secara signifikan dapat mempengaruhi substansi peneliti. Artinya bahwa metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang hendak menjadi pedoman oleh peneliti, sebagaimana yang dikonstantir oleh Bogdan dan Biklen (dalam Moleong: 2006) bahwa karakteristik penelitian kualitatif diantaranya:

1. Peneliti sendiri sebagai instrument utama untuk mendatangi secara langsung sumber data.
2. Mengimplementasikan data yang terkumpulkan dalam penelitian ini lebih cenderung kata-kata kepada hasil.
3. Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata-mata kepada hasil.
4. Melalui analisis induktif, penelitian mengungkapkan makna dari keadaan yang terjadi.
5. Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.

Populasi pada penelitian ini adalah pengusaha industri batu alam yang berjumlah 233. Sampel yang digunakan dalam penelitian dengan berpedoman pada Sugiyono (dalam Apriansyah: 2015) yang menyatakan bahwa: "Untuk berpedoman umum dapat dikatakan bahwa bila populasi dibawah 100 orang maka dapat digunakan sampel 50% dan jika diatas 100 orang sebesar 10%. Dengan demikian dapat diketahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu $233 \times 10\% = 23$ Sampel. Teknik pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (dalam Prawira: 2015) *purposive*

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang atau pengusaha yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data lebih banyak dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Sebelum membahas mengenai bagaimana pola jaminan sosial tenaga kerja industri batu alam di Kecamatan Dukuputang Kabupaten Cirebon berdasarkan maqashid syariah (*an-nafs*). Peneliti akan menerangkan mengenai jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu jaminan yang diberikan kepada pekerja guna melindungi dirinya dari suatu kecelakaan baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk lainnya.

Sedangkan menurut Wahab (2001: 143) jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Berikut ini adalah alur jaminan sosial tenaga kerja.

Gambar 4.2 Model Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Gambar 4.2 memperlihatkan bahwa tidak ada satupun industri batu alam yang menggunakan model jaminan sosial seperti diatas karena seperti yang disampaikan oleh Bapak MA “perusahaan sendiri banyak pengeluarannya, apalagi kalau pemasarannya macet atau tidak normal dari mana uangnya untuk membiayai asuransi tenaga kerja. Kalau terjadi kecelakaan langsung dibawa ke Puskesmas atau dokter dan untuk biaya sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha”. Hal ini juga dipertegas oleh Bapak H. KR “karena tidak adanya kontrak kerja sehingga pekerja dengan seenaknya kerja hari ini kerja, besok bisa keluar ataupun pindah ke yang lain”. Sehingga seluruh industri batu alam menggunakan jaminan sosial seperti pada gambar berikut ini:

Gambar 4.3 Model Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Industri Batu Alam

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa ketika pekerja mengalami kecelakaan saat memproduksi baik itu tergencet, teriris pisau ataupun saat pembakaran batu, pekerja langsung dibawa ke puskesmas dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan mulai dari pengobatan dan kontrol sampai sembuh. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pekerja yang mengalami kecelakaan teriris pisau yaitu AG 27 tahun “ketika saya mengalami kecelakaan saat memproduksi bos atau perusahaan bertanggungjawab sepenuhnya sampai sembuh mulai dari pengobatan dan kontrol sebab bos atau pengusaha membutuhkan saya untuk kembali

kerja atau memproduksi sedangkan saya membutuhkan kesembuhan”. Hal ini juga dipertegas oleh salah satu keluarga korban kesetrum “Anak saya meninggal karena kesetrum di pabrik batu alam ketika sedang memproduksi. Bos atau pengusahanya bertanggungjawab sepenuhnya mulai dari biaya pemakaman, tahlilan dan biaya-biaya lainnya serta memberikan sejumlah uang”.

Hal ini pun disampaikan juga oleh Bapak JA “Memang pekerja yang meninggal dunia karena kesetrum di pabrik, sebelum kesetrum dia mempunyai penyakit jantung atau sedang sakit dan ketika memproduksi memang benar ada setrum yang bocor sedikit pada saat itu pekerja tersebut sedang memproduksi dan akhirnya pekerja meninggal di tempat. Tapi saya bertanggungjawab sepenuhnya mulai dari biaya pemakaman, tahlilan dan biaya-biaya lainnya sampai selesai.”

Seharusnya pengusaha tidak hanya memberikan biaya pengobatan, pemeliharaan kesehatan/kontrol, menjenguknya dan biaya-biaya lainnya saja akan tetapi memberikan sejumlah uang untuk kebutuhannya selama pekerja masih sakit, uang itu bisa diambil dari gaji pekerja dipotong perminggu yang nantinya akan dikembalikan lagi ke pekerja.

Model jaminan sosial yang dilakukan oleh pengusaha industri batu alam merupakan model jaminan sosial tradisional yang sudah lama di gunakan sejak tahun 1995 sampai sekarang, karena merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi pekerja yaitu kebutuhan *dharuriyat*. Kebutuhan *dharuriyat* adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatannya yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Menurut Jasser Auda (dalam Galuh dan H. Hasnari Noor) konsep jaminan sosial tenaga kerja ini merupakan gambaran teori maqashid

kontemporer yaitu maqashid *amah*. Maqashid *amah* adalah nilai dan makna umum yang pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besar seperti kebebasan, keadilan dan kemudahan.

Menurut M. Quraish Shihab (dalam Sarkaniputra: 2009) adil adalah upaya perlakuan terhadap orang lain yang sama bobotnya dengan perlakuan terhadap dirinya sendiri. Seperti hubungan antara pengusaha dan pekerja, pekerja sebagai mitra kerja sehingga pengusaha memperlakukan pekerjanya sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl: 90.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

Dalam ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa antara pengusaha dan pekerja memiliki andil yang sangat besar untuk kesuksesan usahanya, maka pengusaha berkewajiban untuk mensejahterakan dan memenuhi hak-haknya termasuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja karena pekerja merupakan asset bagi perusahaannya. Dalam hal ini peneliti simpulkan bahwa, Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah (*As-Nafs*) sudah sesuai dengan maqashid syariah (*an-nafs*).

SIMPULAN

Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua industri batu alam tidak melakukan kontrak terhadap pekerja sehingga hak-hak

dan kewajibannya menjadi tidak jelas dan pengusaha hanya memberikan jaminan sosial tenaga kerja berupa jaminan kesehatan yang semua biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha karena merupakan bentuk adil antara pengusaha dan pekerja. Model jaminan sosial tenaga kerja industri batu alam yang sesuai di industri batu alam adalah model jaminan sosial tradisional yaitu menanggung semua biaya pengobatan ketika terjadi kecelakaan terhadap pekerja karena model ini lebih mudah dan bersifat kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, Arif. 2015. *Pengaruh Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM-MP Terhadap Lima Kebutuhan Dasar Menurut As-Syatibi*. [Skripsi]. STEI Al-Ishlah Cirebon. Cirebon.
- Fathiah, Atikatul. 2011. *Pengaruh Eksternalitas Industri Batu Alam Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Dukupuntang*. [Skripsi]. STEI Al-Ishlah Cirebon. Cirebon.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Prawira, Raden Dendi Yuda. 2015. *Strategi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Untuk Kesejahteraan Buruh Di Kota Tangerang*. [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang. Serang. [15 November 2016]. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/460/1/Skripsi%20-%20Copy.pdf>
- Puspasari, Milly. 2014. *Analisis Deskriptif Usaha Batu Alam*. [Skripsi]. Universitas Pendidikan Indonesia. [29 April 2016]. http://repository.upi.edu/12538/4/S_PEK_0906132_Chapter1.pdf

- R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan H. Hasni Noor. 2014. *Konsep Maqasid Al-Syariah Dalam menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*. [Jurnal]. Vol. 1. Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin. Banjarmasin. [29 April 2016]. <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>
- Sarkaniputra, Murasa. 2009. *Ruqyah Syar'iyah: Teori Model dan Sistem Ekonomi*. Jakarta. Al-Ishlah Press & STEI.
- Sendjun H, Manulang. 2002. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta. Rhineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suwarto. 2006. *Perlindungan Hukum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992*. [Tesis]. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. [29 April 2016]. <http://eprints.ums.ac.id/7268/1/R100040015.pdf>
- Tarigan, Zamaan. 2008. *Analisis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Tanjung Medan PTPN V Provinsi Riau*. [Tesis]. Universitas Sumatera Utara Medan. Medan. [29 April 2016] <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7036/1/09E00262.pdf>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 89 ayat 1 Tentang Ketenagakerjaan Serta Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Model Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sebagai Hak Tenaga Kerja Industri Batu Alam Di Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

Wahab, Zulaini. 2001. *Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.